

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik mengenai Penetapan Harga Pada Komoditas Beras di Indonesia.

1. Penetapan harga beras di Indonesia saat ini di atur dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Instruksi Presiden (Inpres). Dari tahun 2004 – 2014 tercatat telah terjadi pergantian Inpres sebanyak 7 kali. Penetapan harga yang diatur oleh pemerintah atau(HPP) selalu mengalami peningkatan atau perubahan. Bila harga yang terbentuk di pasar sudah melampaui batas, maka Bulog harus melakukan operasi pasar. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi padi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan usaha tani.
2. Kebijakan pemerintah dalam penetapan harga beras bisa dilakukan dengan adanya stabilitas harga dan subsidi. Untuk kebijakan stabilitas harga, dilakukan melalui pembelian dan penjualan produk pertanian. Disaat musim panen raya, ketika harganya merosot maka pemerintah akan membeli produk pertanian tersebut. Dan saat paceklik, ketika harganya naik maka pemerintah akan menjualnya kembali. Di Indonesia tugas ini ditangani oleh Bulog untuk menstabilkan harga beras. Sedangkan dalam kebijakan subsidi pemerintah memberikan subsidi pupuk dan program raskin. Tujuan dari subsidi pupuk adalah pemerintah berharap untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi sehingga produksi pangan (beras) dan laba usahatani meningkat. Sedangkan untuk program raskin pemerintah memberikan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan

pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin.

3. Permintaan beras Indonesia akan semakin meningkat dikarenakan jumlah penduduk Indonesia semakin lama semakin bertambah. Sehingga di tahun 2014 Indonesia memasuki posisi ke 4 dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu sebanyak 253.6 juta jiwa. Sedangkan penawaran akan meningkat apabila terjadi kenaikan harga pada beras. Penawaran terhadap komoditas beras bisa berubah karena terjadi pengurangan luas lahan dari komoditas yang akan diproduksi seperti lahan sawah, musim yang berlangsung, baik buruknya cuaca, larangan dari pemerintah, atau bencana alam.

5.2 Saran

Saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah:

1. Dalam penetapan harga sebaiknya penetapan HPP di Indonesia merujuk sepenuhnya pada ongkos produksi. Biaya produksi gabah terus meningkat seiring dengan naiknya harga sarana produksi mengakibatkan harga beras lokal lebih mahal dibandingkan harga beras impor. Disini seharusnya penetapan harga yang ada jangan terlalu tinggi sehingga harga beras lokal bisa bersaing dengan beras luar.
2. Kebijakan stabilitas harga harus bisa Program raskin yang pada kenyataannya masih ada yang salah sasaran, distribusi program ini seharusnya hanya diperuntukan bagi penduduk yang benar-benar miskin. Seharusnya pendistribusian raskin perlu diperbaiki agar program ini bisa tepat sasaran kepada penerima raskin.
3. Pemerintah harus bisa tegas dalam mengatur impor beras dan dalam alih fungsi lahan pertanian sebaiknya dikurangi. Karena apabila alih fungsi lahan terus dilakukan maka lahan pertanian akan semakin berkurang dan produksi beras pun akan berkurang. Produksi beras yang kurang

mengakibatkan pengadaan beras yang ada tidak bisa memenuhi permintaan beras dari masyarakat Indonesia.